**PENERAPAN INOVASI *DIGITAL ID* BAGI ASN PEMERINTAH KOTA TEGAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEGAL**

Moh. Azhar Ramdani

NPP. 30.0696

*Asdaf Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah*

*Prodi Studi Kependudukan dan Kependudukan Sipil*

*Fakultas Perlindungan Masyarakat*

Email:kiftianis@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problems/Background (GAP):** The author focuses on the implementation of digital id/digital ID card innovations for Tegal city government employees at the Tegal City Population and Civil Registration Service. **Purpose**: The purpose of this research is to find out the implementation of Digital ID in the Tegal City Population and Civil Registration Service, to find out the supporting and inhibiting factors for implementing Digital ID and to find out the efforts made by the Tegal City Population and Civil Registration Service to optimize the implementation of Digital ID. **Method:** This study uses a qualitative descriptive with an inductive approach based on Sugiyono's theory (2016) with observational data collection techniques, in-depth interviews (11 informants) and documentation including data regarding the Implementation of Digital ID / digital KTP Innovations at the Tegal City Population and Civil Registration Service . **Results/Findings**: The results of this study concluded that the implementation of digital id innovations becomes faster and more efficient because the data integrated in the system can be processed easily and accurately, solving problems that occur in the Tegal City Disdukcapil can be resolved immediately so that new problems do not arise, and the implementation of digital ID/KTP digital innovation at the Tegal City Disdukcapil has been going well because it is in accordance with the existing SOP. In the implementation of the productivity improvement program, there are several factors inhibiting the security of technological devices which are still frequently disrupted, the presence of invalid population data, and social and cultural conditions that are less active. **Conclusion:** Based on the findings and analysis in this study, it is recommended that the Tegal City Disdukcapil carry out network repairs at the Tegal City Disdukcapil, carry out ball-picking techniques for the community, and conduct re-data collection.

**Keywords: application, digital id, innovation**

**ABSTRAK**

**Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) :** Penulis berfokus pada penerapan inovasi digital id/ ktp digital bagi asn pemerintah kota tegal di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Digital ID di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan Digital ID dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal untuk mengoptimalkan penerapan Digital ID. **Metode :** Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan teori Sugiyono(2016) dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam (11 informan) dan dokumentasi meliputi data-data mengenai Penerapan Inovasi Digital ID/KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penerapan inovasi digital id menjadi lebih cepat dan efisien karena data yang terintegrasi dalam sistem dapat diproses dengan mudah dan akurat, penyelesaian masalah yang terjadi di Disdukcapil Kota Tegal dapat segera terselesaikan sehingga tidak timbul permasalahan yang baru, dan penerapan inovasi digital id/ktp digital di Disdukcapil Kota Tegal sudah berjalan dengan baik karena sudah sesuai dengan SOP yang ada. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas terdapat beberapa faktor penghambat keamanan perangkat teknologi yang masih sering mengalami gangguan, adanya data penduduk yang tidak valid, dan keadaan sosial budaya yang kurang aktif. **Kesimpulan :** Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, direkomendasikan agar Disdukcapil Kota Tegal melakukan perbaikan jaringan di Disdukcapil Kota Tegal, melakukan teknik jemput bola terhadap masyarakat, dan melakukan pendataan ulang.

**Kata kunci: penerapan, digital id, inovasi**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Administrasi kependudukan merupakan layanan dasar yang wajib diberikan oleh Pemerintah kepada mayarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan. Sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik.” Untuk itu fasilitas pelayaan umum yang diberikan kepada masyarakat dan yang menjadi tanggung jawab oleh pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 tahun 2022 tentang Spesifikasi Perangkat dan Blangko KTP-el serta ID Digital, yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2022. Sebagaimana diketahui bahwa “perkembangan teknologi akan selalu berpengaruh pada standarisasi dan spesifikasi perangkat keras maupun lunak untuk mencapai identitas kependudukan secara digital baik input maupun outputnya.” Digital ID atau Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Dengan identitas kependudukan digital, masyarakat tidak perlu lagi menyimpan kartu tanda pengenal dalam bentuk fisik. Cukup hanya menunjukkan quick response (QR) code yang ada dalam aplikasi Identitas Kependudukan Digital untuk keperluan administrasi.

Pemerintah Kota Tegal berusaha memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien melalui pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal yang didasari Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal mengupayakan pelayanan tersebut dengan pelayanan yang online melalui website atau aplikasi.

Beberapa permasalahan yang ada di Disdukcapil Kota Tegal yaitu banyaknya masyarakat yang kurang memahami proses pelayanan administrasi kependudukan secara online baik itu proses registrasinya maupun proses pelayanan sehingga masyarakat lebih memilih pelayanan non online dengan datang langsung ke kantor, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dan masih berprinsip mengurus apabila sudah diperlukan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Tegal 2018-2022 menunjukkan angka jumlah penduduk di Kota Tegal yang relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa data kependudukan mengalami perubahan dan pembaharuan setiap tahunnya. Pelayanan publik terkait dengan KTP, saat ini diselenggarakan di setiap kantor yang dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat terkait data dan dokumen kependudukan khususnya KTP jumlah kecamatan di Kota Tegal yaitu 4 kecamatan yang setiap kecamatannya memiliki penduduk diatas 30 ribu jiwa di Tahun 2021. Sedangkan jumlah ASN di Kota Tegal tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunya. Ditahun 2019 mengalami peningkatanya yang cukup signifikan. Hal tersebut tentunya menunjukan data ASN mengalami pembaharuan setiap tahun.

Menurut Prof Zudan “Target Roadmap penerapan identitas digital di seluruh daerah Indonesia di tahun 2022 bervariasi. Di pulau Jawa dan Bali, misalnya, Zudan menyebut 50 persen penduduk yang targetkan sudah memiliki KTP-el digital. Sementara target di NTB 40 persen, Sumatera dan Sulawesi 30 persen, Kalimantan 20 persen, dan Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat sebanyak 10 persen.” Selanjutnya (2022) “Untuk masyarakat yang belum bisa digital tidak apa-apa, nanti dilatih mengingat masyarakat ada yang tidak mempunyai HP, belum ada jaringan dan wifi serta signal. Karena syarat untuk digital itu harus ada jaringan dan signal. Penerapan Digital ID dilakukan secara bertahap saat penerapan kita menerapkan KTP-el dan untuk yang belum mempunyai Digital ID, KTP yang lama masih berlaku,” Dengan roadmap dan penerapan identitas digital secara bertahap tersebut, diperkirakan lima sampai tujuh tahun ke depan pengguna identitas digital bisa mencapai 90 persen.

**1.2 kesenjangan masalah yang di ambil**

Pelayanan administrasi kependudukan secara online masih menemui beberpa hambatan. Apabila dilihat dari data kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil dapat disimpulkan masih rendah. Hal ii dapat dibuktikan bahwa masyarakat yang menerapkan inovasi digital id belu, secara keseluruhan. Hal tersebut terjadi karena bebrapa faktor sperti jaringan yang tersedia di kantor. Apalagi pada saat ini kepengurusan dokumen kependudukan secara online masih belum dipahami dan dimengerti oleh masyarakat banyak. Mutu pendidikan yang diberikan pemerintah juga sanagat berpengaruh terhadap peran serta masyarakat dalam tertib administrasi di Kota Tegal

**1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang memiliki kemiripan atau yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian sebelumnnya dapat dijadikan rujukan maupun pembanding untuk penulis dalam melakukan penelitian.

Skripsi yang disusun oleh Fahruddin Jaya (2011) universitas Hasanuddin berjudul Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Peneyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil. Rumusan permasalahan dalam skripsi tersebut diselesakan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Perbandingan dengan penelitian yang Peneliti lakukan yaitu terdapat persamaan dalam metode penelitian dan variable yang di teliti berupa akses jaringan, SDM, dan infrastruktur. Perbedaan terletak pada alat analisis permasalahan dimana peneliti Fahruddin Jaya menggunakan teori Leo Agustine yaitu kebijakan publik sedangkan peneliti menggunakan teori George R Terry yaitu Planning, Organizing, Actuating, Contolling

Penelitian berjudul Kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Tahun 2021 (Dian Astari Nur, 2021). Penelitian tersebut memiliki kesamaan dari sisi landasan teori yang kita gunakan. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan fokus penelitian dimana Peneliti akan fokus pada pelaksanaan Digital ID

Skripsi berjudul Evaluasi Penerapan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang (Euis Juhaeriah, 2015). Hasil penelitian menyatakan bahwa SIAK yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kota Tangerang telah mencapai predikat baik dalam angka 74,26 persen. Melampaui hipotesis penulis yaitu 70 persen. Persamaan dengan penelitian dilakukan Penulis yaitu menilai penerapan program di Disdukcapil berdasarkan indikator kualitas pelayanan, kualitas sistem, dan kepuasan pengguna. Sedangkan, perbedaannya terdapat dalam metode penelitian dan variabel yang digunakan untuk mengukur penerapan pelaksanaan Digital Id.

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Suryani dan Jamaluddin (2016) penelitian dengan judul “Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa” dengan tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui pelayanan adminduk sebagai dasar pembuatan dokumen kependudukan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat dalam ladasan teori yang digunakan yaitu teori Pelayanan menurut sinambela sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori George R Terry yaitu Planning, Organizing, Actuating, Contolling.

Penelitian yang dilakukan Ahokiab Mosso, Frans Singkoh, Ismail Sumampow (2018) penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat” hasil penelitian menyatakan bahwa adanya temuan kendala dalam pelayanan dan sarana prasanan kurang maksimal. Persamaan dengan yang dilakukan oleh penulis adalah dalam metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaanya terdapat dalam lokus penelitian dan landasan teori.

Sebagai kesimpulan, kelima judul penelitian di atas memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu dilihat dari beberapa indikator penelitian. Indikator-indikator tersebut diantaranya terkait akses jaringan, infrastruktur dinas, kinerja pegawai, kemampuan kerja pegawai, sumber daya manusia, sikap pelaku kebijakan, SOTK, dan sebagainya.

**Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian ada pada penerapan inovasi digital id bagi asn pemerintah Kota Tegal oleh disdukcapil Kota Tegal yang ditinjau dari fungsi manajemen menurut George R. Terry (2016). Penelitian akan dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

**1.4 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis penerapan inovasi Digital ID bagi ASN Pemerintah Kota Tegal, factor penghambat penerapan Digital ID bagi ASN Pemerintah Kota Tegal, dan upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menangani hambatan penerapan Digital ID ASN Pemerintah Kota Tegal.

**II. METODE**Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan kondisi sebenarnya ke dalam analisis dan perumusan masalah di lapangan, penelitian kualitatif menggambarkan kondisi sebenarnya pada saat penelitian.

Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan periode penelitian minggu awal bulan Januari 2023 sampai dengan minggu pertengahan Februari 2023.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan yang ada dalam penelitian ini berjumlah sebelas (11) orang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan, Operator Digital ID yang berjumlah tiga (3) orang dan ASN yang memperoleh layanan administrasi kependudukan melalui Digital ID berjumlah lima (5) orang.

Teknik analisis data dilakukan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

**III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Penerapan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal**

**3.1.1 Analisis Teoritik Penerapan KTP Digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal**

Identitas kependudukan digital (KTP Digital) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Sejalan dengan amanat Permendagri No. 72 Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan pengembangan dan perbaikan SIAK menjadi KTP Digital. Identitats Kependudukan Digital (KTP Digital) dilaksanakan sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan publik dengan satu data, satu server, dan satu data senter. Lebih lanjut, KTP Digital diselenggarakan untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan akurat serta diupayakan untuk menghilangkan pungutan liar dan calo. Sejak ditetapkan pada Tahun 2019, SIAK mengalami pengembangan menjadi sistem terpusat dan mengalami perkembangan menjadi Identitas Kependudukan Digital (KTP digital) yang diterapkan secara bertahap di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Tahap uji coba penerapan KTP digital ini dilaksanakan pada aparatur sipil negara di 514 kota/ kabupaten yang ada di Indonesia.

Penulis menganalisis dengan fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry (1958), yaitu :

1. Perencanaan (*Planning*)

Pernyataan dari Bapak Basuki, S.E,M.M. di atas selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal menunjukkan sikap pro terhadap kebijakan dari pemerintah terkait penerapan KTP Digital. Walaupun pada awal penerimaan amanat ini banyak terdapat rekan-rekan yang ragu, namun berhasil diarahkan dan dimotivasi untuk menerapkan KTP digital. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah pusat, uji coba penerapan KTP digital di Dinas Dukcapil Kota Tegal juga sebagai bentuk perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Tegal. Indikator-indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan Dinas Dukcapil Kota Tegal dalam penerapan KTP digital dari sisi dimensi perencanaan (planning) menurut teori George R. Terry dalam Sukarna (2011:15) diantaranya:

1. Tujuan penerapan KTP digital di Dinas Dukcapil Kota Tangerang

Penerapan KTP digital di Dinas Dukcapil Kota Tegal bukan tidak beralasan. Selain sebagai bentuk loyalitas terhadap kebijakan pemerintah pusat seperti yang diutarakan oleh kepala dinas Dukcapil Kota Tegal, peralihan sistem menjadi KTP digital ini merupakan langkah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Apabila pelayanan sudah menggunakan KTP digital maka seluruh data kependudukan tersimpan di android masing masing dan server pusat milik Kemendagri. Dengan demikian, akan memperkecil kemungkinan terkait kepemilikan data ganda dan akan meningkatkan jaminan kerahasiaan data penduduk karena data penduduk hanya bisa diakses satu per satu oleh operator SIAK sekalipun.

1. Tahapan penerapan KTP Digital di Dinas Dukcapil Kota Tegal

perpindahan sistem menjadi Identitas Kependudukan Digital (KTP digital) memberikan dampak bagi pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Tegal menjadi efisien dan praktis. Seluruh data kependudukan yang ada di server lokal Dinas Dukcapil Kota Tegal harus dimigrasikan ke server pusat Kemendagri. Migrasi data tersebut mengakibatkan pelayanan online dengan aplikasi Jakwir Cetem sudah tidak dapat diakses lagi.

1. Penetapan standar dalam penerapan KTP Digital di Dinas Dukcapil Kota Tegal

Penerapan Identitas Kependudukan Digital merupakan rangkaian kegiatan dirjen dukcapil. Penilaian terhadap standar pelaksanaan kegiatan tidak hanya dilihat dari hasil pelaksanaan saja, melainkan juga dilihat dari sarana manajemennya. Sarana manajemen dapat diuraikan menjadi, men (manusia), money (uang), materials (materi), methods (metode), machines (mesin) dan markets (pasar). Dari sudut pandang men (manusia) dapat dikatakan sudah memenuhi standar. Berdasarkan latar belakang pendidikan, 29 orang PNS dan 15 orang Supporting Staff (SS) yang mengoperasikan SIAK mempunyai latar belakang dapat mengoperasikan komputer. Standar sarana manajemen money (uang) merupakan kepastian anggaran dalam pelaksanaan pengembangan SIAK ke KTP digital. Berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 tentang Spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas kependudukan Digital pendanaan pelaksanaan penerbitan Identitas Kependudukan Digital di kabupaten/kota bersumber dari APBD kabupaten/kota (pasal 25). Dalam sudut pandang materials (materi) dapat berupa kesempurnaan dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital itu sendiri. Aplikasi Identitas Kependudukan Digital dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan sedang dalam tahap uji coba pelaksanaan. Methods (metode) dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital ini telah disusun sedemikian rupa sehingga dalam proses migrasi data dan pelatihan bagi operator dapat berjalan lancar dalam waktu yang cukup singkat. Untuk standar pelaksanaan dari sisi machine (mesin), dapat dilihat dari kesiapan sarana prasarana pendukung penerapan KTP digital. Terdapat beberapa perangkat komputer di Disdukcapil Kota Tegal yang sudah tergolong tua (pengadaan 2012), namun dengan peremajaan alat masih dapat digunakan untuk mendukung penerapan KTP digital. Penetapan markets (pasar) dari pelaksanaan KTP digital yaitu dengan menargetkan di kawasan Pulau Jawa dan Pulau Bali, 50 persen penduduk bisa memiliki KTP Digital. Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi, yakni 30 persen penduduk, sementara di Pulau Kalimantan sebesar 20 persen. Target untuk kawasan luar Jawa-Bali adalah di NTB, yakni 40 persen penduduk. Pulau-pulau kawasan Indonesia Timur, seperti Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat, target kepemilikan KTP Digital baru di angka 10 persen penduduk.

1. Pengorganisasian (*Organizing*)

Penelitian terkait kesiapan Dinas Dukcapil Kota Tegal dalam penerapan KTP digital dari segi pengorganisasian kegiatan Penulis tetapkan penggunaan aspek pembagian kerja dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab pihak pelaksana Identitas Kependudukan Digital. Kebijakan peralihan sistem menuju KTP digital ini menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, namun secara teknis berada di bawah Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data. Pemanfaatan Data melaksanakan tugas terkait persiapan teknis perpindahan sistem menuju KTP digital. Kegiatan mengkomunikasikan kebijakan perubahan KTP digital yang terintegrasi dengan SIAK diperlukan agar seluruh client di pelayanan kecamatan maupun MPP siap akan perubahan tersebut. Selanjutnya kegiatan sosialisasi dan bimtek untuk perubahan KTP digital ini termasuk dalam kegiatan tata kelola sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.

1. Penggerakan (*Actuating*)

Definisi pergerakan memberikan gambaran bahwa tercapai atau tidaknya suatu tujuan tergantung pada bergerak atau tidaknya seluruh anggota kelompok manajemen, dari tingkat atas, menengah, hingga bawah. Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi penggerakan untuk penelitian terkait Kesiapan Dinas Dukcapil Kota Tegal dalam penerapan KTP digital yaitu faktor kepemimpinan dan adanya perangsang (incentive). Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja dengan ikhlas untuk mencapai tujuan bersama. Indikator kedua sebagai tolak ukur dimensi penggerakan (actuating) yaitu dengan perangsang (incentive) yang diberikan kepada pegawai. Pengelompokan insentif menurut George R. Terry terbagi menjadi beberapa jenis yaitu, insentif positif, insentif negatif, insentif finansial dan insentif non finansial. Pemberian insentif dalam uji coba penerapan KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal tidak diadakan secara khusus.

1. Pengawasan (*Controlling*)

Bentuk pengawasan menurut pendapat Bapak Basuki SE., MM., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas lebih cenderung terhadap pengawasan penggunaan data. Sistem KTP digital ini yang menjadikan seluruh data kependudukan tersimpan di server pusat lebih menjamin akan keamanan data kependudukan. Bapak Tunggal Prayitno,S.IP, menyampaikan bahwa tindakan pengawasan terhadap penerapan KTP digital di Kota Tegal dilakukan oleh seluruh yang terlibat dalam perubahan sistem ini, baik operator, verifikator, dan lain-lain. Aplikasi KTP digital masih dalam tahap pengembangan sehingga sering terjadi update di pusat dan harus sesegera mungkin diinstal di daerah. Tindakan perbaikan dalam menghadapi perubahan KTP digital yang terintegrasi dengan SIAK Terpusat dilakukan oleh tim pengembang di Ditjen Dukcapil. Langkah perbaikan yang dapat dilakukan di daerah yaitu dengan perbaikan jaringan, pembaharuan dan peremajaan sarana prasarana pendukung penerapan KTP digital.

**3.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Penerapan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam Penerapan KTP Digital**

Beberapa hal yang menjadi pendorong dan penghambat dalam penerapan KTP digital di Dinas Dukcapil Kota Tegal dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu :

1. Faktor Pendorong
2. Regulasi yang mengatur

Berdasarkan regulasi tentang Identitas Kependudukan Digital (KTP digital) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 disampaikan bahwa pihak kementerian dalam negeri menerapkan KTP digital dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai dari pegawai disdukcapil secara nasional pada tahun 2022. Perubahan sistem KTP digital ini merupakan wujud pengembangan SIAK dalam upaya peningkatan kualitas data kependudukan Indonesia. KTP digital akan lebih menjamin ketunggalan data penduduk, keamanan data penduduk, dan kecepatan pelayanan. Selain itu, dengan memanfaatkan KTP digital, proses penandatanganan dengan memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) menjadi lebih cepat. l

1. Sumberdaya yang kompeten

Berdasarkan data penelitian, jumlah seluruh operator di Dinas Dukcapil Kota Tegal yaitu 20 orang. Jumlah operator SIAK untuk bidang Pendaftaran Penduduk paling banyak karena bidang pendaftaran penduduk terbagi atas beberapa tim yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan jemput bola perekaman KTP-El dan KIA. Bidang PIAK sebagai penanggung jawab pelaksana Identitas Kependudukan Digital ID hanya memiliki 7 operator SIAK. .

1. Faktor Penghambat
2. Sarana dan prasarana

Pernyataan narasumber menyatakan bahwa tidak semua sarana prasarana dalam kondisi baru, namun dapat dilakukan perbaikan dan peremajaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menginstal SIAK terpusat. Pernyataan tersebut selaras dengan hasil pengamatan penulis pada daftar tabel 4.8 yang bahwasanya memang terdapat komputer pengadaan tahun 2010 hingga 2016 yang masih mampu mendukung operasionalisaI KTP digital terintegrasi dengan SIAK terpusat.

1. Sumber daya manusia

Salah satu faktor yang menghambat dalam penerapan KTP digital yang terintegrasi dengan SIAK terpusat yaitu sumber daya manusianya kedudukan operator SIAK secara organisasi. Operator SIAK merupakan Pegawai Pemerintah Daerah Kota Tegal dan Anak magang PKL yang melaksanakan tugas perbantuan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal.

**3.1.3 Upaya yang Dilakukan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam Mengoptimalkan Penerapan KTP Digital**

1. Peningkatan *software* SARPRAS

Sebagai upaya dalam menyelesaikan beberapa hambatan terkait sarana-prasarana penunjang KTP digital, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal melakukan update sistem operasi di perangkat komputer yang akan dipasang aplikasi SIAK terpusat.

1. Sumberdaya manusia

Upaya yang dilakukan Dinas Dukcapil dalam mengoptimalkan kesiapan penerapan KTP digital yaitu dengan memberikan pelatihan dan sosialisai secara intensif kepada operator KTP digital terintegrasi SIAK. Pelatihan yang diberikan kepada operator KTP digital disampaikan langsung oleh tim SIAK Kemendagri selama proses migrasi data kependudukan di Dinas Dukcapil Kota Tegal.

**3.1.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penerapan inovasi digital id bagi asn pemerintah Kota Tegal di dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tegal sudah dilakukan dengan baik. Hal ini didukung dengan oleh baiknya fasilitas atau sarana prasarana penunjang kepungurusan penerapan inovasi digital id di dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Layaknya program yang lain, penerapan digital id ini memiliki beberapa hambatan seperti keamanan dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan . dari permasalahan tersebut pihan dinas kependudfukan dan pencatatan sipil Kota Tegal selalu mengupayakan evaluasi hambatan yang terjadi serta untuk meminimalisir hambatan yang akan terjadi di kemudian hari dengan cara melakukan perbaikan jaringan komunikasi internet serta menyinkronkan setiap data base penduduk yang ada di server kota tegal, melakukan teknik jemput bola untuk masyarakata dan melakukan sosialisasi secara terus menerus berkesinambungan, Disdukcapil Kota Tegal juga melakukan pendataan ulang terhadap setiap penduduk yang datany belum valid

**IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis Penulis terhadap Kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam penerapan KTP digital Penulis dapat menyimpulkan bahwa :

**4.1 Penerapan KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal**

Melalui serangkaian pengamatan dan penarikan kesimpulan hasil wawancara, Penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal dalam menghadapi perpindahan sistem menuju KTP digital terintegrasi SIAK terpusat berada pada ukuran baik. Dinas Dukcapil Kota Tegal dapat dikatakan siap dalam penerapan KTP digital didasarkan pada penilaian terhadap 4 (empat) fungsi manajemen George R. Terry (1958) yaitu:

* 1. Indikator dalam fungsi Perencanaan (*planning*) sudah terpenuhi dengan baik
  2. Indikator dalam fungsi pengorganisasian (*organizing*) meliputi pembagian kerja dan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan dengan jelas. .
  3. Indikator dalam fungsi Penggerakan (*actuating*) terkait pada sikap kepemimpinan manajer dan ada tidaknya insentif sebagai reward bagi pegawai.
  4. Indikator dalam fungsi Pengawasan (*controlling*) dimana terdapat pengukuran pelaksanaan dan pembandingan dengan standar pelaksanaan KTP digital.

**Keterbatasan penelitian** penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian serta penelitian ini tidak dapat memperoleh data observasi secara langsung program pelatihan tenaga kerja yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil

**Arah masa depan penelitian( future work )** penulis meyadari masih awalnya temuan penelitian ini, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukakan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program pelatihan tenaga kerja di Kota Tegal untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

**V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, Peneliti mendapatkan banyak dukungan baik moril ataupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Peneliti menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Drs. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Drs. Udaya Majid M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri
3. Bapak Dr. Romi Saputra, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Institut Pemerintahan Dalam Negeri
4. Ibu Dr. Gatiningsih MT selaku pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan waktu selama penyusunan Skripsi ini
5. Para Dosen, Pelatih serta Pengasuh dan juga seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri
6. Rekan-rekan Praja Utama Angkatan XXX yang telah memberikan semagat kebersamaan dalam penulisan Skripsi.
7. Rekan-rekan Praja Angkatan XXX dan juga Adik-adik angkatan XXXI, XXXII, dan XXXIII Asal Pendaftran Jawa Tengah yang selalu memberikan dukungan serta bantuan kepada peneliti dalam berbagai kondisi

**VI. DAFTAR PUSTAKA**

Moleong, L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Arikunto, S. 2019. (2019). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Drucker, P. F. (2012). *Proses inovasi produk pada PT Mekar Usaha Nasional. Agora, Jurnal Manajemen Bisnis,* Jakarta: Airlangga

Ellitan, L dan Annantan, L. (2009). *Manajemen inovasi, transformasi menuju organisasi kelas dunia, Bandung: Alfabeta*.

Fakhrulloh, Z. A. dan E. Wismulyani. 2016. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.* Klaten: Cempaka Putih

Gupta, P. (2007). *Business inovation in the 21st century. North Charleston, South Carolina: Dipak Jain, Dean Kellogg School of Management*.

Hutasoit, I. 2017. *Pengantar Ilmu Kependudukan.* Bandung:Alfabeta

Menulis Stamm, B. . (n.d.). *Managing innovation, design and creativity (2nd ed). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.*

Slameto. (2010). *Belajar dan Faktor Faktor Yang Mempengaruhi*. Jakarta :Rineka Cipta.

Sugiyono. (2013). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Metode*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Metode*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen. Bandung:* Mandar Maju.

Terry, G. R. (2016). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Alih Bahasa J.Smith. Jakarta: Bumi.

Trott, P. (2008). *Innovation management and new product development. 4 th edition. Prentice Hal, London*.

Yuliasih, S. 2018. *Demografi.* Yogyakarta: Istana Media

Ahokiab Mosso, Frans Singkoh, I. S. (2018). *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat*.

Jamaluddin, I. S. &. (2016). *Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*.

Jaya, F. (2011). *Analisis Kesiapan Pemerintah Kota Palopo dalam Penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*.

Juhaeriah, E. (2015). *Evaluasi Penerapan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang*.

Nur, D. A. (2021). *Kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat Tahun 2021*.